

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR



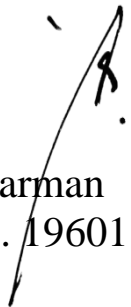
Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akhirnya disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran kinerja yang diimplementasikan pada tahun tertentu. Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun 2019 ini menyuguhkan data capaian kinerja yang telah diwujudkan dalam tahun berjalan, dimana mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan harapan pemangku kegiatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan.

Pada masa akan datang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita capai dapat tercapai dan pada akhirnya menciptakan *Good Governance* pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat secara khusus dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara umum.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat pada seluruh satuan kerja jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Kantor Wilayah



Suharman
NIP. 19601113 198503 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai suatu pondasi tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) merupakan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dengan *accountability* yang tepat, jelas dan nyata untuk kepastian tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Hal diatas dikenal dengan istilah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimulai dari tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dilakukan

evaluasi atas LKIP tersebut. Sehingga dengan penjelasan diatas akan terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya untuk mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diwajibkan untuk membuat laporan atas capaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam capaian kinerja indikator Satuan Kerja Peraturan Perundang-undangan (PP) masuk dalam kategori sangat baik yang mencapai target yang telah ditentukan pada awal Tahun 2019. Capaian kinerja tertinggi disumbangkan oleh kinerja bidang hukum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar. Adapun capaian kinerja untuk penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebesar Rp. 148.934.044.000,- terealisasi sebesar Rp. 143.197.412.898,-

Adapun capaian kinerja terkait dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun 2019 belum mencapai 100% yaitu SMART dengan nilai 90,15 dan IKPA dengan nilai

89,27%, namun demikian secara kualitas kegiatan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik pada Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas pemerintahan secara efisien, dan efektif. Sistem pertanggungjawaban ini dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam laporan ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat beserta analisisnya, dalam rangka tujuan dan sasaran serta diprioritaskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2019. Adapun manfaat Laporan

Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah untuk :

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
4. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan;
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. DASAR HUKUM

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 - 2019;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

C. TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR WILAYAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019, diatur bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Mengacu pada hal tersebut tugas dari Kementerian Hukum dan HAM sebagian tugasnya direpresentasikan pada Kantor Wilayah melaksanakan tugas Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah.

TUGAS KANTOR WILAYAH

MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM WILAYAH
PROVINSI BERDASARKAN KEBIJAKAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG.

FUNGSI KANTOR WILAYAH

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, pelaksanaan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT**



SUHARMAN
Kepala Kantor Wilayah



Kepala
Div.Admin

Kepala
Div.Pas

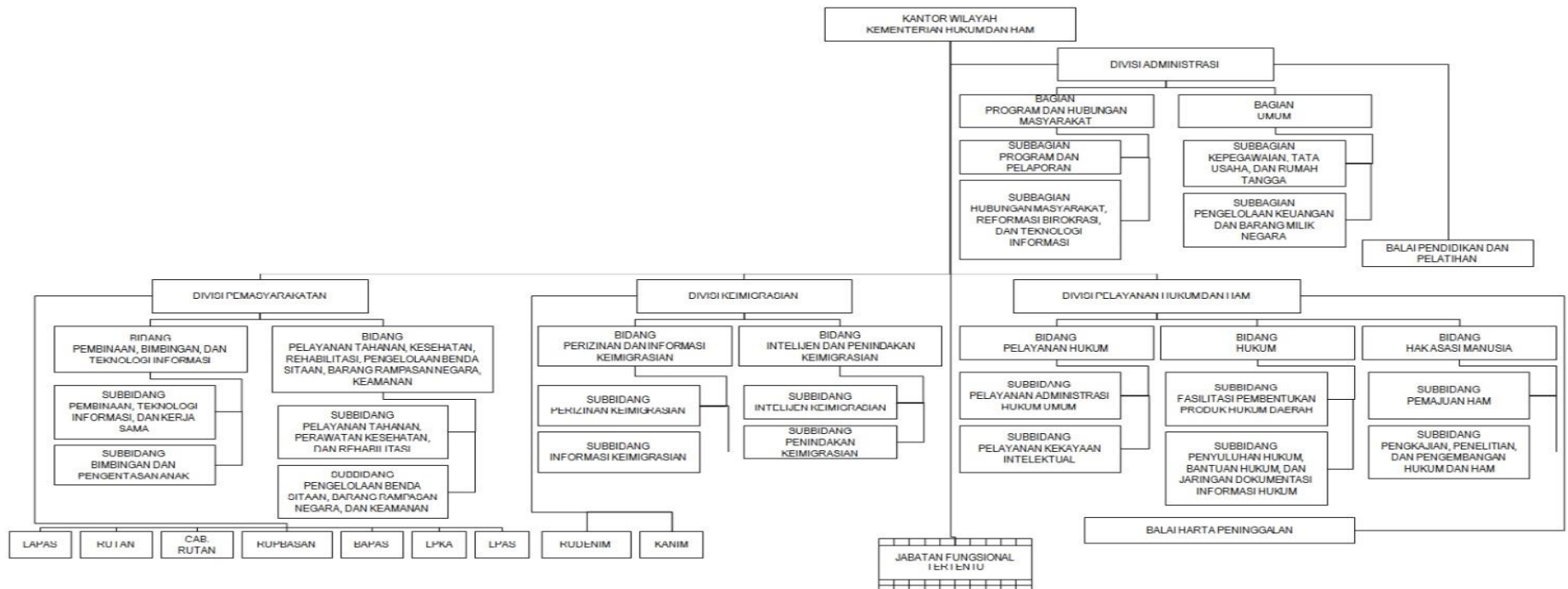
Kepala
Div.Im

Kepala
Div.Yankum

Adapun Struktur Organisasi Kantor Wilayah terdiri atas :

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Kantor Wilayah ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari s/d Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja yang dijabarkan dalam LKIP ini merupakan analisa terhadap capaian indikator sembilan program terdiri atas : Program Sekretariat Jenderal. Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Program AHU, Program Direktorat Jenderal HAM, Program Balibangkumham, Program KI, Program BPHN, Program Direktorat Jenderal PP, dan Program Direktorat Jenderal Imigrasi, Dengan menggabungkan analisa diatas, diharapkan pelaporan dari LKIP ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih berkualitas, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang akan datang.

E. PERMASALAHAN ORGANISASI

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mencapai kualitas pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi. Maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengucurkan anggaran pada jenis belanja modal guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan;
2. Masih diperlukan penguatan atas “*Law Centre*” Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat khususnya dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran 2019 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi kendala pada capaian kinerja;
4. Kurangnya penguatan dari pemangku program pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan sinergi dengan divisi administrasi selaku fasilitatif.

Dengan kerangka berpikir tersebut diatas, sistematika penyajian LKIP adalah sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Kesimpulan atas LKIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja yaitu suatu proses penyusunan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta Satuan Kerja Pelaksana Teknis dalam hal ini pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan arah pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dituju melalui langkah yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur presentase keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah dalam hal memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Berlandaskan hal tersebut diatas maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

V I S I

“MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM “

M I S I

- 1. MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS;**
- 2. MEWUJUDKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKUALITAS;**
- 3. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS;**
- 4. MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PEMENUHAN, DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA;**
- 5. MEWUJUDKAN LAYANAN MANAJEMEN ADIMINISTRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;**
- 6. MEWUJUDKAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS**

TATA NILAI

1. PROFESIONAL

2. AKUNTABEL

3. SINERGI

4. TRANSPARAN

5. INOVATIF

B. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	7.1	10.733.123.000,-
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	70	

		Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	90	
Meningkatnyakualitas penyelenggaraan pemasyarakatan	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan sumatera barat	90	107.270.789.000 ,-
Meningkatnya produktivitas narapidana/ anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna		Persentase mantan narapidana/ anak yang berhasil sumatera barat	30	
Meningkatnya ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien pemasyarakatan		Menurunnya persentase residivis sumatera barat	10	
Meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan,		Persentase Basan baran yang dikelola sesuai dengan standar sumbar	90	

pembimbingan klien pemasyarakatan dan pengelolaan basan baran	barat		
	Persentase tahanan yang mendapat perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar Sumatera barat	90	
	Persentase narapidana yang mendapat pembinaan sesuai dengan standar Sumatera barat	90	
	Persentase anak yang mendapat bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar Sumatera barat	90	
	Persentase klien yang mendapatkan bimbingan	90	

		kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar sumatera barat		
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemsayarakatan sesuai dengan standar sumatera barat	90	
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	1. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	119,38 6	12.711.531.000,-
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	
Meningkatnya		Jumlah	72	

Penegakan Hukum Keimigrasian		Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan		
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Terselenggaranya Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12 laporan	3.500.000.000,-
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Sumatera Barat yang berkualitas baik sekali	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Sumatera Barat	80	173.057.000,-
		Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi daerah sumatera barat	80	
		Persentase	80	

		penyelenggaraan penegakan hukum di daerah sumatera barat		
		Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Sumatera Barat	80	
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian di wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia	20	41.115.000,-
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	
Jumlah pemerintah	Penyelenggaraan	Jumlah	4	240.482.000,-

daerah yang melaksanakan program aksi HAM	pemajuan HAM di Wilayah	pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Pemda	
		Jumlah Kab/kota peduli HAM	3 Pemda	
		Jumlah layanan HAM di Wilayah	1 Layanan	
Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah				
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80	251.470.000,-
	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	40	60.730.000,-

		substansi perancangan daerah		
	Total			276.200.000,-
Terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	60	1.019.214.000,-
		Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	5	
		Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayah	1 daerah	
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 daerah	
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 daerah	
		Terselenggaranya layanan informasi	1 daerah	

		hukum melalui sistem JDIHN		
		Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50	

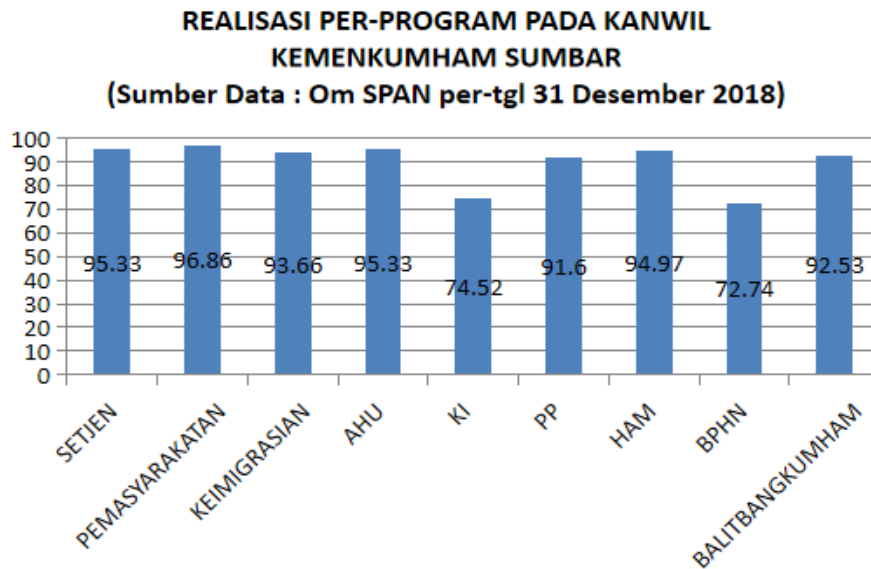
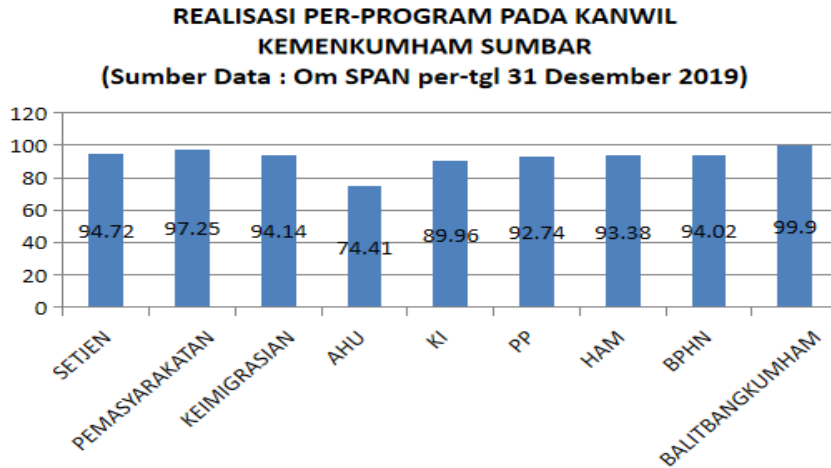
Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pimpinan Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

**GRAFIK PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

BERDASARKAN JENIS BELANJA

BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEGAWAI	78.517.770.000	76.915.782.405	97.96
BARANG	68.958.578.000	64.887.951.768	94.01
MODAL	1.457.696.000	1.393.678.725	95.61
JUMLAH	148.934.044.000	143.197.412.898	96.15

**GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PER-PROGRAM
PADA KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**

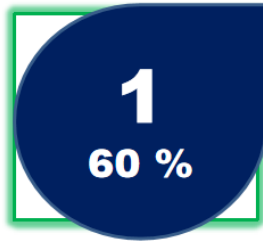




KINERJA ANGGARAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMBAR TA 2019

(Sumber Data : Aplikasi Smart dan Om-SPAN tanggal 31 Desember 2018)

SMART



90,15 %

IKPA



89,27 %



KINERJA ANGGARAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMBAR TA 2018

(Sumber Data : Aplikasi Smart dan Om-SPAN tanggal 31 Desember 2018)

SMART



93,57 %

IKPA



94,28 %



C. PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019

Perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan 9 (sembilan) unit Eselon I dengan unit kerjanya yang menerima amanah/ tanggungjawab. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diimplementasikan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diimplementasikan oleh unit kerja Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam kurun waktu satu tahun dengan ketersediaan sumber daya yang dikelolanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat di wilayah sebagai representasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2019.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan dari Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat beserta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait strategi pemecahan masalah untuk dioptimalkan dan sebagai acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Definisi kinerja dapat digunakan sebagai tingkat keberhasilan kelompok individu. Dimana kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau target, kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada indikatornya.

Sementara pengukuran kinerja adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diukur kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat pada tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator. Adapun hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara umum kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat terlaksana, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut :

**TABEL PENGUKURAN KINERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

● **DIVISI ADMINISTRASI**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	7.1	8.5	113,3
Hukum dan HAM Sumatera Barat	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	70	39.55	56,5
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	90	91.53	101,7

Capaian kinerja Pada program Divisi Administrasi diwilayah dapat dijelaskan berdasarkan output kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019, antara lain :

Indikator Kinerja 1 :

- **Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.**

Pada indikator kinerja indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 7,1 indeks. Pelaksanaan layanan yang diberikan pada 37 satuan kerja dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi sebesar 8.5 dan capaian kinerja sebesar 119,7 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dimana Kantor Wilayah melakukan survey kepuasan pelayanan pada Divisi Administrasi 37 Satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah yang kemudian dilakukan penilaian dengan metode Linkert sehingga diperoleh hasil seperti diatas. (questineor terlampir). Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Indikator Kinerja 2 :

● Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Pada indikator kinerja nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 70 %. Adapun pelaksanaan reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39.55 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas merupakan *output* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang telah dilakukan penilaian oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor surat :ITJ.PW.03.01.III-114 tanggal 13 Mei 2019 perihal Informasi atas Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun 2019 (data terlampir) yang merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Indikator Kinerja 3 :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Pada indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90. Adapun pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 91,53 % sampai dengan Triwulan IV. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas merupakan *output* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan monitoring pada aplikasi SPAN (Sistem Penganggaran dan Anggaran Negara) dengan menu Monev Pelaksanaan Anggaran. Dimana aplikasi tersebut merupakan produk dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dimana setiap satuan kerja dari Kementerian/ Lembaga dapat mengakses aplikasi ini dengan menggunakan admin dan password yang dimilikinya.

● DIVISI PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnyakualitas penyelenggaraan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan sumatera	90	90	100

		barat			
2	Meningkatnya produktivitas narapidana/ anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase mantan narapidana/ anak yang berhasil sumatera barat	30	30	100
3	Meningkatnya ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien masyarakatan	Menurunnya persentase residivis sumatera barat	10	10	100
4	Meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien masyarakatan dan pengelolaan basan baran	Persentase Basan baran yang dikelola sesuai dengan standar sumbar barat	90	90	100
		Persentase tahanan yang mendapat perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar sumatera barat	90	80	88,89
		Persentase narapidana yang mendapat pembinaan sesuai dengan standar sumatera barat	90	80	88,89
		Persentase anak yang mendapat bimbingan masyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar sumatera barat	90	80	88,89
		Persentase klien yang mendapatkan bimbingan masyarakatan dan pengawasan sesuai dengan	90	80	88,89

		standar sumatera barat			
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sumatera barat	90	80	88,89

Capaian kinerja pada program Divisi Pemasyarakatan diwilayah dapat dijelaskan berdasarkan *output* kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019, antara lain :

Indikator Kinerja 1 :

● Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Sumatera Barat

Pada indikator kinerja indeks masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan sumatera barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 %. Pelaksanaan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan yang diberikan pada 26 satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 26 (dua puluh enam) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan dimana Divisi Pemasyarakatan melakukan kompilasi atas penilaian yang

diberiakan oleh masyarakat atas layanan pemasyarakatan Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan

Indikator Kinerja 2 :

● Persentase Mantan Narapidana/ Anak yang Berhasil Sumatera Barat

Pada indikator kinerja mantan narapidana/ anak yang berhasil sumatera barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 30 %. Pelaksanaan mantan narapidana/ anak yang berhasil pada 26 satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 26 (dua puluh enam) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap mantan narapidana/ anak yang berhasil sumatera barat dimana Divisi Pemasyarakatan melakukan kompilasi atas penilaian keberhasilan mantan narapidana/ anak menjadi mandiri. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya produktivitas narapidana/ anak menuju manusia yang mandiri yang berdaya guna.

Indikator Kinerja 3 :

● Menurunnya Persentase Residivis Sumatera Barat

Pada indikator kinerja menurunnya persentase residivis sumaterabarat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 10 %. Pelaksanaan menurunnya persentase residivis sumaterabarat pada 26 satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 26 (dua puluh enam) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien pemasyarakatan.

Indikator Kinerja 4 :

Persentase Basan Baran yang Dikelola Sesuai dengan Standar Sumatera Barat

Pada indikator kinerja Basan Baran yang dikelola sesuai dengan Standar Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 %. Pelaksanaan Basan Baran yang dikelola sesuai dengan Standar Sumatera Barat pada satuan kerja pemasyarakatan yaitu RUPBASAN Klas I Padang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemasyarakatan dan pengelolaan basan baran

Indikator Kinerja 5 :

● Persentase Tahanan yang Mendapat Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar Sumatera Barat

Pada indikator kinerja Tahanan yang Mendapat Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 %. Pelaksanaan Tahanan yang Mendapat Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar pada Lapas/

Rutan satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,98 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 23 (dua puluh tiga) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemasyarakatan dan pengelolaan basan baran meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemasyarakatan dan pengelolaan basan baran.

Indikator Kinerja 6 :

● Persentase Narapidana yang Mendapat Pembinaan Sesuai dengan Standar Sumatera Barat

Pada indikator kinerja narapidana yang mendapat pembinaan sesuai dengan standar Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 % . Pelaksanaan narapidana yang mendapat pembinaan sesuai dengan standar Sumatera Barat pada Lapas/ Rutan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,98 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 23 (dua puluh tiga) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas

kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien masyarakat.

Indikator Kinerja 7 :

● Persentase Anak yang Mendapat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak Sesuai dengan Standar Sumatera Barat

Pada indikator kinerja anak yang mendapat bimbingan masyarakat dan pengentasan anak sesuai dengan standar Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 %. Pelaksanaan anak yang mendapat bimbingan masyarakat dan pengentasan anak sesuai dengan standar Sumatera Barat pada Bapas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,98 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 2 (dua) satuan kerja masyarakat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien masyarakat.

Indikator Kinerja 8 :

● Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai dengan Standar Sumatera Barat

Pada indikator kinerja klien yang mendapat bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 %. Pelaksanaan klien yang mendapat bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar Sumatera Barat pada Bapas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,98 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 2 (dua) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemasyarakatan.

Indikator Kinerja 9 :

● Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai dengan Standar Sumatera Barat

Pada indikator tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sumatera barat, target

kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 %. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar Sumatera Barat pada Lapas/ Rutan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,98 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 26 (dua puluh enam) satuan kerja pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, pembimbingan klien pemasyarakatan.

● DIVISI KEIMIGRASIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	3. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	119,386	900,784	754,51
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	7,6	0,01
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai	72	41	56,94

		dengan ketentuan			
--	--	------------------	--	--	--

Indikator Kinerja 1 :

- **Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan**

Pada indikator kinerja jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 119.386 dokumen. Pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 754,51% . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya pelayanan keimigrasian.

Indikator Kinerja 2 :

- **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian**

Pada indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 7,3 %. Pelaksanaan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0,01 % . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya pelayanan keimigrasian.

Indikator Kinerja 3 :

● Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan

Pada indikator kinerja penyelesaian tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 72 %. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 56,94 . Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada 2 (dua) satuan kerja keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan

ketentuan. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung meningkatnya penegakan hukum penyelesaian tindak pidana Keimigrasian.

● **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12 laporan	12	100

Indikator Kinerja 1 :

● **Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan**

Pada indikator kinerja penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan pada satuan kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 12 laporan. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan satuan kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %.

Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Sumatera Barat yang berkualitas baik sekali	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Sumatera Barat	80	160	200
		Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi daerah sumatera barat	80	140	175
		Persentase penyelenggaraan penegakan hukum didaerah sumatera barat	80	140	175
		Meningkatnya database kekayaan	80	140	175

		intelektual komunal Kantor Wilayah Sumatera Barat			
--	--	---------------------------------------------------------	--	--	--

Indikator Kinerja 1 :

● Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang Diterima Kantor Wilayah Sumatera Barat

Pada indikator kinerja permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Sumatera Barat pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 80 %. Pelaksanaan permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Sumatera Barat satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 160 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Sumatera Barat yang berkualitas baik sekali.

Indikator Kinerja 2 :

● Persentase Penyelenggaraan Promosi dan Diseminasi Daerah Sumatera Barat

Pada indikator kinerja penyelenggaraan promosi dan diseminasi daerah Sumatera Barat pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 80 %. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi dan diseminasi daerah Sumatera Barat satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 140 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Sumatera Barat yang berkualitas baik sekali.

Indikator Kinerja 3 :

3. Persentase Penyelenggaraan Penegakan Hukum Didaerah Sumatera Barat

Pada indikator kinerja penyelenggaraan penegakan hukum didaerah Sumatera Barat pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah

ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 80 %. Pelaksanaan penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Sumatera Barat satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 140 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut di atas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Sumatera Barat yang berkualitas baik sekali.

Indikator Kinerja 4 :

● Meningkatnya Database Kekayaan Intelektual Komunal Kantor Wilayah Sumatera Barat

Pada indikator kinerja meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Sumatera Barat pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 80 %. Pelaksanaan meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Sumatera Barat satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 140 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut di atas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terciptanya layanan

kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Sumatera Barat yang berkualitas baik sekali.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian di wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia	20	20	100
2.	Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100

Indikator Kinerja 1 :

● Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Pada indikator kinerja rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia pada satuan kerja Balitbangkumham dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 20 %. Pelaksanaan rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan

pengembangan hak asasi manusia satuan kerja Kekayaan Intelektual (KI) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Balitbangkumham dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian di wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indikator Kinerja 2 :

● Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

Pada indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah pada satuan kerja Balitbangkumham dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 1 buku. Pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah satuan kerja Balitbangkumham dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja yaitu 1 buku. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Balitbangkumham dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Pemda	4 Pemda	100
		Jumlah Kab/ kota peduli HAM	3 Pemda	3 Pemda	100
2.	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah layanan HAM di Wilayah	1 Layanan	2 Layanan	200

Indikator Kinerja 1 :

● Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Pada indikator kinerja pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 4 Pemda. Pelaksanaan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 100 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output*

layanan pada satuan kerja HAMdilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.

Indikator Kinerja 2 :

● Jumlah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

Pada indikator kinerja Kab/ kota peduli HAM pada satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 3 Pemda. Pelaksanaan Kab/ kota peduli HAM satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 100 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja HAMdilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.

Indikator Kinerja 3 :

● Jumlah Layanan HAM di Wilayah

Pada indikator kinerja layanan HAM di wilayah pada satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 layanan.

Pelaksanaan layanan HAM di wilayah satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 200 % layanan. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja HAM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80	385	481
		Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan daerah	40	140	350

Indikator Kinerja 1 :

● Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi Sesuai dengan Permohonan

Pada indikator kinerja rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan pada satuan kerja Peraturan Perundang-undangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 80. Pelaksanaan rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan satuan kerja Peraturan Perundangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebanyak 481 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Peraturan Perundangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

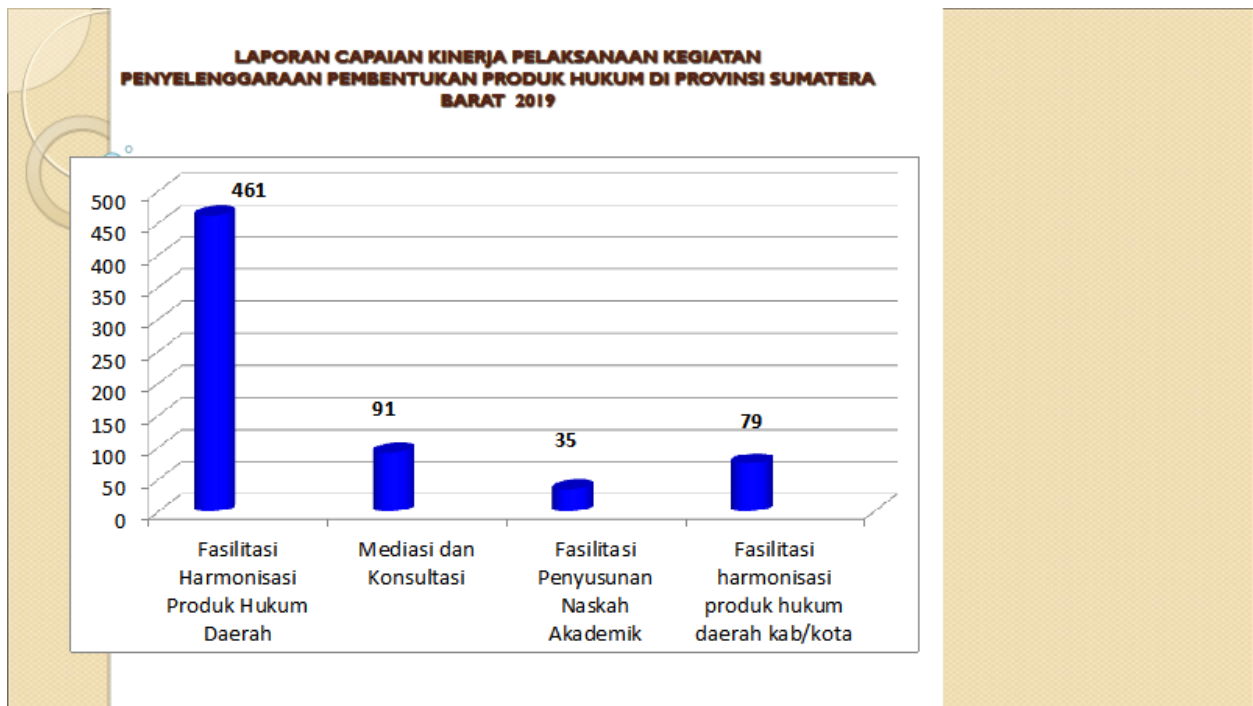
Indikator Kinerja 2 :

● Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan Didaerah yang Mendapatkan Pembinaan Substansi Perancangan Daerah

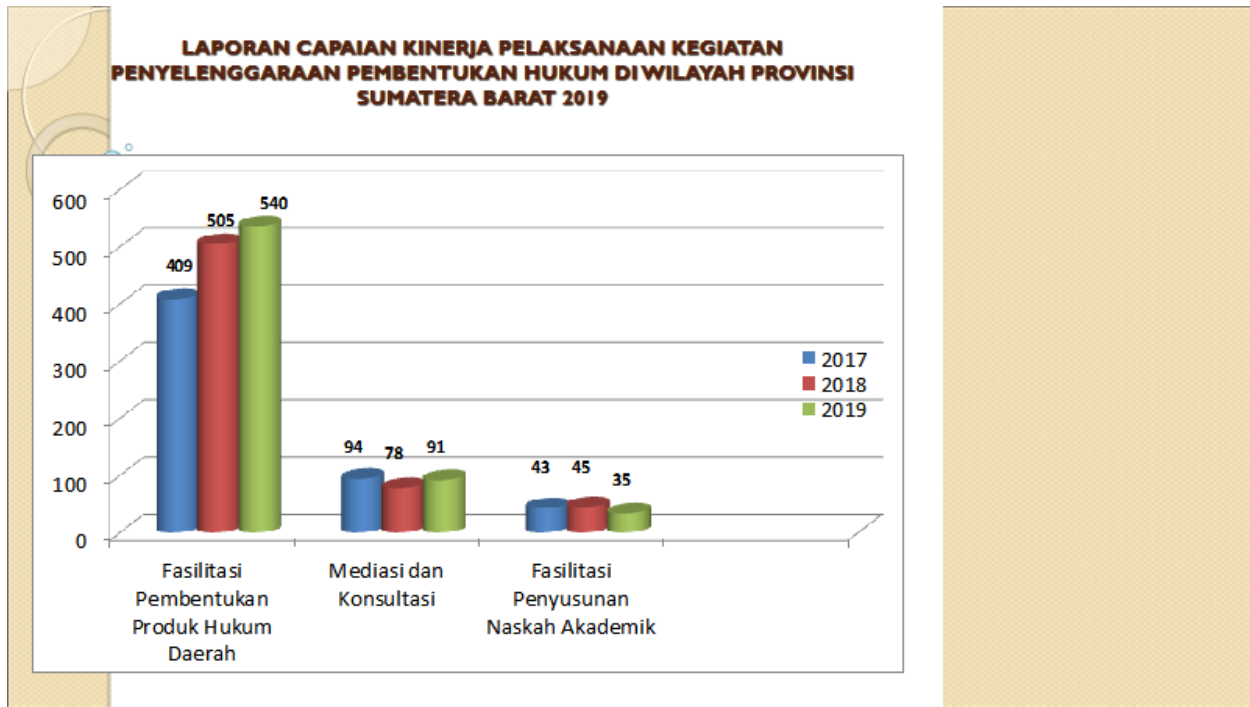
Pada indikator kinerja jumlah perancang peraturan perundang-undangan didaerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan daerah pada satuan kerja Peraturan Perundang-undangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 40 orang. Pelaksanaan jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan daerah pada satuan kerja Peraturan Perundangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 350 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Peraturan Perundangan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berikut Grafik Capaian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut :



Berikut Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t	Realisasi	Capaian %
1	Terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	60	220	366,67
		Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/ kelompok masyarakat miskin	5	16	320

kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayah	1 daerah	4	400
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 daerah	13	1300
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 daerah	41	4100
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 daerah	12	1200
	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50	50	100

Indikator Kinerja 1 :

● Jumlah Orang atau Kelompok Orang Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi

Pada indikator kinerja jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 60 kasus. Pelaksanaan jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan

hukum litigaspada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 366,67 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum

Indikator Kinerja 2 :

● Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Kepada Orang/ Kelompok Masyarakat Miskin

Pada indikator kinerja jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 5 kegiatan. Pelaksanaan jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/ kelompok masyarakat miskin pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 320 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka

mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Indikator Kinerja 3 :

● Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah

Pada indikator kinerja terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayah pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 daerah. Pelaksanaan terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayahpada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 400 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Indikator Kinerja 4 :

● Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah

Pada indikator kinerja jumlah penyuluhan hukum di daerah pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 daerah. Pelaksanaan jumlah penyuluhan hukum di daerah pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1300 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Indikator Kinerja 5 :

● Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pada indikator kinerja terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 daerah. Pelaksanaan terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 4100 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut di atas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Indikator Kinerja 6 :

● Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN

Pada indikator kinerja terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 daerah. Pelaksanaan terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1200 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Indikator Kinerja 7 :

Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)

Pada indikator kinerja pelatihan/ peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik) pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 daerah. Pelaksanaan pelatihan/ peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik) pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan *output* layanan pada satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Hal ini merupakan *output* penting dalam rangka mendukung terselenggaranya pembinaan hukum ditingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisa dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk program, kegiatan, target capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan dibawah ini :

1. Pencapaian kinerja pada tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kegiatan dalam organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi stakeholder pemerintahan di wilayah Propinsi Sumatera Barat melalui berbagai kemitraan;
2. Dalam upaya peningkatan kinerja dan terwujudnya akuntabilitas pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, perlu diupayakan perencanaan kinerja yang matang, Perencanaan Kinerja merupakan hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik.

B. SARAN

Upaya untuk peningkatan kinerja satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen dalam pemahaman dan implementasi serta tujuan dari alokasi anggaran pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada IKPA di Tahun 2019;
2. Perlunya sarana dan prasarana guna menunjang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai daya dukung peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai;
3. Perlunya pembagian tugas yang jelas Sumber Daya Manusia sebagai penyusun rencana anggaran, bendahara, dan operator pelaporan agar tidak dibebankan tugas kepada 1 (satu) orang.